



Ranah Research :

Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Koordinasi Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Cimahi

Bagus Wahyudi¹, Muradi², Neneng Yani Yuningsih³

¹ Universitas Padjadjaran, Indonesia, bagus20002@mail.unpad.ac.id

² Universitas Padjadjaran, Indonesia, muradi@unpad.ac.id

³ Universitas Padjadjaran, Indonesia, neneng.yani@unpad.ac.id

Corresponding Author: bagus20002@mail.unpad.ac.id

Abstract: *Hydrometeorological disasters, especially floods, contribute to 95% of all disasters in Indonesia. However, the flood management process in Cimahi City does not pay attention to the maximum role of the government, private sector and community to take part in the process of policy formulation, implementation and policy evaluation. Problems such as poor drainage systems, piling up of rubbish, crowded residential and industrial areas, and lack of public awareness have contributed greatly to flooding events in Cimahi City. The aim of this research is to describe and analyze the government coordination process in managing flood disasters in Cimahi City using G.R Terry's theory in measuring coordination with seven indicators, namely Communication, Awareness of the Importance of Coordination, Participant Competence, Agreement and Commitment, Determination of Agreement, Coordination Incentives, to Feedback. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and literature study. The results of the research show that government coordination in Cimahi City regarding flood disaster management is less than optimal, not all stakeholders are included in coordination events, coordination tends to only take place between two OPDs and there are differences between regulations and realization in the field coupled with complicated bureaucratic flows and not maximizing The role of FPRB is to slow down the flood disaster management process, in the process it tends to focus on one OPD only so that the lack of coordination efforts makes the flood disaster management process less than optimal and requires evaluation for the sustainability of the program in the fu.*

Keyword: *Floods, Coordination, Governance, Management, Disasters.*

Abstrak: Bencana hidrometeorologi, terutama banjir, berkontribusi 95% dari seluruh bencana di Indonesia. Namun proses penanggulangan banjir di Kota Cimahi kurang memperhatikan peran maksimal dari pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk ikut andil dalam proses perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Permasalahan seperti sistem drainase yang buruk, menumpuknya sampah, padatnya

pemukiman dan industri, hingga minimnya kesadaran masyarakat berkontribusi besar pada peristiwa banjir di Kota Cimahi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses koordinasi pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi menggunakan teori dari G.R Terry dalam mengukur koordinasi dengan tujuh indikator, yaitu Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan dan Komitmen, Penetapan Kesepakatan, Insentif Koordinasi, hingga *Feedback*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pemerintahan di Kota Cimahi terkait penanggulangan bencana banjir kurang maksimal, tidak semua *stakeholder* diikutsertakan dalam acara koordinasi, koordinasi cenderung hanya berlangsung antar dua OPD saja dan adanya perbedaan antara regulasi dan realisasi di lapangan ditambah dengan alur birokrasi yang rumit dan kurang memaksimalkan peran FPRB sehingga memperlambat proses penanggulangan bencana banjir, dalam prosesnya cenderung menitikberatkan kepada salah satu OPD saja sehingga kurangnya upaya koordinasi tersebut menjadikan proses penanggulangan bencana banjir kurang maksimal dan memerlukan evaluasi untuk keberlangsungan program kedepannya.

Kata Kunci: Banjir, Koordinasi, Pemerintahan, Penanggulangan, Bencana.

PENDAHULUAN

Bencana hidrometeorologis berkontribusi 95% dari total keseluruhan bencana alam yang ada di Indonesia dan itu didominasi oleh bencana banjir. Pulau Jawa menjadi pulau dengan jumlah bencana paling banyak dibandingkan pulau lainnya yang diantaranya disebabkan oleh hadirnya perkembangan kota tanpa perencanaan yang matang, ekspansi wilayah urban, meningkatnya lahan terbangun, kurangnya koordinasi antar pihak dalam upaya penanggulangan bencana, hingga kurangnya pemahaman masyarakat. Selama periode 1 Januari-4 Desember 2023 telah terjadi 3.489 peristiwa bencana alam di seluruh Indonesia yang sebagian besar didominasi oleh banjir, yaitu sebanyak 989 peristiwa dari total keseluruhan bencana yang terjadi. Berdasarkan seluruh kejadian bencana pada periode tahun 2023 ini mengakibatkan 7,52 juta orang mengungsi, 5.713 orang luka-luka, 222 orang meninggal dunia, dan 15 orang hilang. Tidak hanya itu, bencana alam juga telah mengakibatkan 29.241 rumah dan 755 fasilitas umum mengalami kerusakan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membawahi penanggulangan bencana banjir di tingkat nasional, sedangkan di tingkat daerah tanggung jawab tersebut berada di tangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD berperan sebagai penggerak dan koordinator program dan tindakan penanggulangan bencana sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Di Kota Cimahi, BPBD dibentuk pada awal tahun 2016 berdasarkan peraturan daerah dan berfungsi sebagai unsur pendukung di bawah yurisdiksi Walikota, dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki beberapa kendala seperti regulasi yang kurang komprehensif dalam membahas setiap rencana program kegiatan BPBD, upaya penanggulangan banjir masih bersifat parsial dimana koordinasi antara BPBD dan setiap Perangkat Daerah belum berjalan secara efektif, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif, hingga kurangnya dukungan masyarakat maupun pihak swasta dalam penanggulangan bencana. BPBD Kota Cimahi belum memiliki

Dokumen Kajian Risiko Bencana yang pada umumnya dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam upaya penanggulangan bencana.

Penyebab bencana banjir di Kota Cimahi antara lain disebabkan oleh faktor alih fungsi lahan, kondisi drainase yang buruk, dan kondisi tempat pembuangan sampah (TPS) di seluruh wilayah yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2017, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Cimahi berkurang menjadi 230,09 hektar sehingga menghambat resapan air dan meningkatkan limpasan air. Kelangkaan ruang terbuka hijau, khususnya di Kabupaten Cimahi Selatan, disebabkan oleh tingginya konsentrasi industri dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Daerah tersebut juga menghadapi tantangan seperti kapasitas drainase yang tidak memadai dan penyumbatan akibat penumpukan sampah, yang memperburuk masalah banjir.

Kota Cimahi kurang mengoptimalkan koordinasi pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir, hal ini terbukti dengan tidak adanya koordinasi yang melibatkan pihak swasta dan masyarakat. Rencana Strategis tidak memiliki kejelasan mengenai pemangku kepentingan mana yang harus berpartisipasi dan peran mereka dalam upaya tanggap banjir, sehingga menyebabkan kurangnya kerja sama yang terintegrasi antar pihak. Peneliti dalam mengukur tingkat keberhasilan koordinasi pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi menggunakan landasan teori dari G.R. Terry yang memandang koordinasi sebagai *“through the management process”* dan mengukurnya dalam segi proses menggunakan tujuh indikator, yaitu Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan dan Komitmen, Penetapan Kesepakatan, Insentif Koordinasi, dan *Feedback* (Ndraha, 2015). Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak pemerintah dapat mengkaji dengan lebih dalam terkait pihak mana saja yang dianjurkan untuk turut serta dalam upaya penanggulangan bencana banjir sekaligus menerapkan konsep koordinasi pemerintahan secara baik, yaitu diikutsertakannya pihak swasta dan masyarakat dalam setiap acara atau program untuk menghasilkan output yang lebih maksimal.

Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan banjir, Kota Cimahi memerlukan koordinasi pemerintah yang lebih baik dalam menentukan peran perangkat daerah, swasta, dan masyarakat dalam upaya pencegahan banjir. Maka dari itu, tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuh indikator dalam penilaian koordinasi pemerintahan untuk melihat dan memeriksa efektivitas masing-masing layanan atau lembaga terkait upaya koordinasi dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi.

METODE

Penelitian yang dilakukan di Kota Cimahi ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menelaah, menggambarkan, dan memaparkan terkait keadaan yang sebenarnya terjadi yang kemudian dianalisis untuk dapat ditarik menjadi sebuah simpulan mengenai koordinasi pemerintahan dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi. Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan studi literatur. Sedangkan teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah Teknik *purposive sampling* dan Teknik *snowball*.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknis untuk menguji kebenaran data. Triangulasi sumber membantu mengidentifikasi informasi yang kurang atau hilang dan membandingkan data dari berbagai sumber. Triangulasi teknis memvalidasi data dengan menguji sumber yang sama, misalnya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi waktu tidak digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini karena dalam proses pengambilan data dilakukan hanya sekali kepada orang yang sama tanpa adanya upaya validasi data karena pada penelitian ini tidak memfokuskan kepada perubahan perilaku seseorang terkait suatu hal.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2019) mengemukakan bahwa proses dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga selesai sehingga menyebabkan data menjadi jenuh. Kegiatan analisis data terbagi menjadi tiga tahap, yaitu data *reduction* (reduksi data), *data display* (Penyajian data), dan *conclusion* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi dalam Proses Koordinasi Pemerintahan

BPBD Kota Cimahi secara efektif mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana melalui tiga fase, yaitu: Pra Bencana, Darurat, dan Rehabilitasi/Konstruksi yang dilakukan baik secara tatap muka atau virtual melalui aplikasi pihak ketiga seperti whatsapp dan instagram. Mereka mengadakan Rapat Koordinasi setiap tiga bulan sekali untuk membahas perkembangan program kerjanya, salah satunya terkait bencana banjir. BPBD juga turut andil dalam penyusunan Peraturan Wali Kota Cimahi untuk upaya penanggulangan bencana banjir tahun 2022. Dalam proses koordinasi pemerintahan, BPBD Kota Cimahi cenderung lebih banyak berkomunikasi dengan pihak DPKP dan FPRB Kota Cimahi dan proses komunikasi sangat minim terjadi dengan pihak lainnya terutama swasta. Bappelitbangda Kota Cimahi sering berkomunikasi dengan DPKP Kota Cimahi baik secara formal maupun nonformal sebagai lembaga teknis yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir, dan kedua OPD tersebut melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terkait program kerja yang sedang dan telah dilaksanakan. Mereka juga melakukan komunikasi dengan DPRD Kota Cimahi yang biasanya terjalin setiap triwulan. Komunikasi antara pihak bappelitbangda dengan BPBD kurang maksimal, salah satunya adalah karena Bapperlitbangda baru mulai tahun 2024 ini melakukan koordinasi dengan BPBD Kota Cimahi dan itupun hanya terkait bencana longsor dan pergerakan tanah saja.

Dalam ruang lingkup DPKP Kota Cimahi, proses komunikasi berjalan dengan baik dan cukup optimal karena pihak DPKP memiliki dua group besar yang difungsikan sebagai media pertukaran informasi secara internal maupun eksternal badan. Secara internal DPKP memiliki group yang bernama 'Jaga Kamalir' yang didalamnya terdapat dua tim, yaitu tim yang melakukan pemeliharaan sungai dan drainase yang dinamakan 'tim kecebong' yang terdiri dari 17 orang per kecamatan dengan jumlah total tiga kecamatan dan tim lainnya yang melakukan pengawasan atau pemantauan yang dinamakan 'tim mantri kamalir' dengan jumlah 6 orang untuk melakukan pengawasan sungai dari hulu ke hilir. Sedangkan untuk berkomunikasi secara eksternal, DPKP memiliki group 'sawakamalir' yang didalamnya terdapat beberapa OPD di Kota Cimahi yang salah satu diantaranya adalah BPBD.



Sumber: Diskominfo Kota Cimahi, Tahun 2023

Gambar 1. 1 Tim Kecebong DPKP Kota Cimahi membersihkan saluran Irigasi

Sedangkan kegiatan komunikasi dengan pihak legislatif dalam hal ini DPRD Kota Cimahi dilakukan setiap tiga bulan sekali dalam forum diskusi atau rapat paripurna, DPRD kurang melakukan komunikasi secara intens terkait upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi, DPRD disini memposisikan diri sebagai regulator dan memfasilitasi jika ada keluhan masyarakat sekaligus mengawasi kinerja eksekutif dalam menjalankan program kerjanya, jelas Ketua Komisi III DPRD Kota Cimahi.

Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Cimahi fokus pada upaya prabencana untuk meminimalisir terjadinya bencana alam. Forum yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi ini bermitra dengan 49 lembaga, baik pemerintah maupun swasta dan lebih aktif berkomunikasi dengan masyarakat. Meskipun terdapat peraturan yang kuat mengenai pembentukan dan kelangsungan forum, FPRB merasa bahwa kinerjanya sering dipandang sebelah mata. Forum tersebut memiliki grup WhatsApp untuk komunikasi antara pengurus dan untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan.

Pihak FPRB merasa bahwa kinerjanya selalu dipandang sebelah mata, walaupun sudah ada regulasi yang sangat kuat terkait pembentukan forum dan untuk keberlangsungan kegiatan, namun pada kenyataannya dukungan dari pemerintah dirasa masih minim, FPRB memiliki group di aplikasi Whatsapp untuk melakukan komunikasi antar pengurus forum dan group untuk berkomunikasi dengan lembaga-lembaga, berikut ini adalah beberapa tanggapan gambar dari group yang dimiliki oleh Forum PRB Kota Cimahi sekaligus beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh FPRB Kota Cimahi.

Sedangkan dari sisi masyarakat merasa bahwa komunikasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah kurang dirasakan konektivitasnya, walaupun terdapat masyarakat yang pernah melakukan komunikasi langsung dengan pihak DPKP Kota Cimahi dengan mendatanginya langsung ke Pemkot Cimahi namun peristiwa seperti itu masih bisa dihitung jari frekuensinya, bahkan salah satu Kader wilayah juga menyatakan bahwa sosialisasi rawan bencana banjir tidak pernah dilakukan secara formal, kegiatan komunikasi hanya dilakukan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat pada saat terjadi bencana banjir saja.

Kesadaran Pentingnya Koordinasi dalam Proses Koordinasi Pemerintahan

BPBD Kota Cimahi menekankan pentingnya koordinasi khususnya dengan aktor masyarakat dan pihak ketiga/swasta dalam penanganan bencana banjir. BPBD Kota Cimahi mengadakan rapat koordinasi yang biasanya berlangsung selama tiga bulan sekali dengan OPD terkait seperti DPKP dan FPRB untuk mengevaluasi program kerja dan menganalisis kebutuhan di masa depan. DPKP Kota Cimahi menekankan perlunya koordinasi secara lebih intens antar OPD daerah agar penanganan bencana banjir berjalan lebih baik. Pihak DPKP memahami perbedaan antara genangan dan banjir yang mempunyai pengertian berbeda sehingga akan berdampak pada penanganan kedepannya. Sungai yang berada di DAS Citarum dan DAS Strategi Nasional merupakan kewenangan dari BBWS, sehingga apabila terjadi banjir itu kewenangan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai, namun walaupun secara konteks banjir melong instansi yang paling berwenang adalah BBWS bukan berarti Pemkot Cimahi angkat tangan.

Sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya koordinasi, pihak BPBD Kota Cimahi pernah melakukan silaturahmi dan audiensi dengan pihak BNPB RI terkait penguatan kelembagaan dan program kegiatan penanggulangan bencana di Kota Cimahi yang dipimpin oleh Pj. Wali Kota Cimahi, Bapak Dikdik Suratno Nugrahawan, S. Si., M.M. yang didampingi Struktural dari lingkungan BPBD Kota Cimahi dalam hal ini Kepala Pelaksana, Bapak Fithriandy Kurniawan, S. Sos. beserta jajaran pada 17 Mei 2022 seperti yang terdokumentasikan pada foto di bawah ini.



Sumber: Instagram BPBD Kota Cimahi, 2024

Gambar 1. 2 Audiensi BPBD Kota Cimahi dengan BNPB RI

DPRD Kota Cimahi yang sebagai lembaga legislatif menekankan koordinasi melalui forum triwulanan penanganan bencana banjir. Selain itu juga berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat dan memonitor kinerja badan eksekutif untuk menilai pelaksanaan program kerja untuk memastikan efektivitas penanganan bencana banjir. Dalam bentuk kesadaran akan pentingnya koordinasi, DPRD Kota Cimahi pernah bertemu dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk berdiskusi dan berkoordinasi pada tanggal 7 September 2023 dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi bantuan sarana dan prasarana bagi BPBD Kota Cimahi. Dalam konsultasi dan koordinasi ini, pihak DPRD Kota Cimahi berharap dapat mempelajari program dan kebijakan penanggulangan bencana yang saat ini diterapkan BNPB, serta protokol dan cara meminta bantuan ke BNPB. Temuan konsultasi dan kerja sama ini kemungkinan besar akan berujung pada dukungan dan bantuan BNPB dalam meningkatkan kapasitas dan fasilitas penanggulangan bencana Kota Cimahi

Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) merupakan organisasi relawan yang telah aktif dalam upaya penanggulangan bencana banjir selama lima tahun. Meski tidak mendapat pendanaan dari pemerintah, forum ini bertujuan untuk memperkuat institusi dan organisasi dalam penanggulangan bencana, berkolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, serta membuat pedoman perencanaan pembangunan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi dampak bencana, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup. FPRB merasa bahwa koordinasi merupakan hal yang sangat penting dalam memaksimalkan upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi, FPRB merasa bahwa sudah menjadi tugasnya dalam menganalisis dari segi pra bencana sehingga risiko bencana dapat berkurang. Hal ini dibuktikan dengan loyalnya para pengurus forum dalam berjalannya kegiatan secara sukarela atau tanpa imbalan berupa upah.

Sedangkan untuk melihat kesadaran akan pentingnya koordinasi pada masyarakat dilihat dari jawaban atas pertanyaan terkait siapakah yang paling bertanggung jawab atas penanggulangan bencana banjir dan apakah peranan dari masyarakat atas upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi dan sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa tanggung jawab dalam penanganan bencana banjir adalah pemerintah daerah, namun sebagai masyarakat juga memiliki kewajiban untuk membantu terutama di daerahnya sendiri.

Kompetensi Partisipan dalam Proses Koordinasi Pemerintahan

Proses koordinasi di lingkungan BPBD Kota Cimahi melibatkan pimpinan dari bidang terkait yang memimpin rapat, dan perannya sebagai penggerak dinilai memadai dan sesuai peraturan. Namun, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dengan hanya 14 pegawai negeri sipil dan 22 staf tidak tetap, sebagian besar lulusannya adalah sekolah menengah atas. Untuk mengatasi hal ini, sesi bimbingan teknis

rutin dilakukan untuk 6-7 pegawai BPBD, di samping lokakarya peningkatan kapasitas bagi relawan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengendalian operasional, seperti yang ditekankan oleh Kepala Bidang Darurat dan Logistik.



Sumber: Humas Kota Cimahi

Gambar 1. 3 BPBD Kota Cimahi gelar pelatihan kapasitas kepada anggota TRC-PB

Gambar tersebut menunjukkan pelatihan yang dilakukan BPBD Kota Cimahi pada 2-3 Agustus 2023 dengan fokus pada peningkatan kemampuan tanggap darurat khususnya terkait pengungsi, operasi penyelamatan, dan pemulihan infrastruktur. Diselenggarakan di Plaza Rakyat Kota Cimahi dan dihadiri oleh perwakilan dari TNI, Polri, Kajari, Perangkat Daerah, unsur kecamatan, hingga FPRB Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil analisis BNPB yang tertuang dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2021, Kota Cimahi memperoleh skor sebesar 91,71 yang menunjukkan Kerentanan Sedang di berbagai indeks risiko bencana. Indeks ketahanan daerah Kota Cimahi tergolong sedang, dengan nilai IKD sebesar 0,76 (level 3). Arti dari level 3 adalah Kota Cimahi sudah memiliki program daerah yang dapat membantu menurunkan risiko bencana (BPBD Kota Cimahi, 2023). BNPB tidak mengeluarkan pemeringkatan secara spesifik terkait BPBD mana yang terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian IKD, namun ada pemeringkatan terkait kelas risiko bencana berdasarkan daerah yang dilihat dari nilai Indeks Risiko Bencana seperti yang ada pada gambar di bawah ini.

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	KELAS RISIKO 2022
1	CIANJUR	250.00	250.00	226.48	207.13	207.13	215.08	197.08	207.62	TINGGI
2	SUKABUMI	231.20	231.20	213.22	190.75	190.75	190.75	192.40	186.61	TINGGI
3	TASIKMALAYA	224.80	224.80	224.80	203.01	203.01	203.01	186.51	174.11	TINGGI
4	GARUT	238.00	238.00	208.63	208.63	208.63	205.52	185.00	164.91	TINGGI
5	KARAWANG	175.20	175.20	175.20	175.20	175.20	174.43	165.58	157.81	TINGGI
6	SUBANG	175.20	175.20	175.20	175.20	175.20	171.91	168.78	157.25	TINGGI
7	CIREBON	181.20	181.20	181.20	170.79	160.63	160.63	147.51	156.58	TINGGI
8	BANDUNG	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	161.89	145.94	TINGGI
9	KOTA BANJAR	152.80	152.80	152.80	152.80	152.80	152.80	152.80	145.04	TINGGI
10	KOTA CIREBON	183.60	183.60	183.18	172.76	172.76	172.76	157.19	141.07	SEDANG
11	PANGANDARAN	215.20	215.20	192.11	168.52	145.44	145.44	129.21	137.36	SEDANG
12	MAJALENGA	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	143.43	124.74	136.35	SEDANG
13	CIAMIS	215.20	178.23	173.66	163.29	156.23	141.57	122.22	133.52	SEDANG
14	SUMEDANG	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	142.15	124.39	129.87	SEDANG
15	PURWAKARTA	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	137.31	124.53	128.98	SEDANG
16	KOTA BEKASI	131.60	131.60	131.60	131.60	131.60	131.60	123.18	124.95	SEDANG
17	BEKASI	164.80	164.80	152.03	133.03	133.03	132.89	130.11	124.10	SEDANG
18	INDRAMAYU	175.20	175.20	175.20	167.22	167.22	136.79	114.59	122.49	SEDANG
19	BOGOR	152.40	152.40	152.40	136.88	136.88	136.88	125.31	116.54	SEDANG
20	KOTA TASIKMALAYA	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	117.37	114.69	SEDANG
21	KUNINGAN	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	131.13	131.13	113.58	SEDANG
22	BANDUNG BARAT	162.00	119.97	119.97	115.01	110.22	110.22	108.18	108.89	SEDANG
23	KOTA BANDUNG	154.00	125.99	122.32	122.32	122.32	122.32	111.32	103.05	SEDANG
24	KOTA SUKABUMI	114.40	114.40	114.40	114.40	114.40	114.40	102.67	92.91	SEDANG
25	KOTA CIMAH	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	105.41	91.71	82.01	SEDANG
26	KOTA DEPOK	102.40	95.10	89.63	89.63	89.63	89.63	82.56	76.53	SEDANG
27	KOTA BOGOR	107.20	87.45	82.35	75.75	75.75	75.75	65.38	71.01	SEDANG

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022

Gambar 1. 4 Tabel nilai rasio bencana Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2015-2022

Di Bappelitbangda Kota Cimahi, peran kunci dalam penanggulangan bencana banjir dilaksanakan pada sektor Infrastruktur dan Wilayah. Rapat koordinasi melibatkan pejabat

yang lebih tinggi seperti Kepala Badan atau Divisi. Meskipun memiliki tenaga kerja yang cukup sebanyak 6 orang PNS dalam penanggulangan bencana banjir, namun masih ditemukan belum adanya kegiatan bimbingan teknis bagi pegawai Bappelitbangda yang fokus pada upaya penanggulangan bencana banjir. Yang mengikuti acara koordinasi dari pihak DPKP adalah Seksi Drainase dan Seksi P4 bertugas melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni pascabencana seperti banjir. Meskipun sumber daya manusia di DPKP dinilai mampu dari segi kualitas, namun terdapat kekurangan dalam hal kuantitas untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Program bimbingan teknis pada internal DPKP biasanya menargetkan tim kecebong dan kamalir, yang masing-masing terlibat langsung dalam kerja lapangan dan mengawasi operasi lapangan. Namun DPKP menekankan perlunya peningkatan koordinasi dan menyarankan agar BPBD sebagai koordinator meningkatkan upaya koordinasi. Selain itu, DPKP mencatat meningkatnya kompleksitas birokrasi di bawah kepemimpinan BPBD yang baru, hal ini diungkapkan oleh Kepala Divisi Perumahan dan Permukiman.

Indikator kompetensi dalam Forum PRB berbasis institusi dan bukan berbasis individu. Hingga tahun 2024, sudah ada 50 institusi yang mencakup pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas. Namun keberlanjutan forum ini bergantung pada 10 anggota inti yang dipimpin oleh seorang ketua. Partisipasi terbuka bagi siapa saja yang bersedia, dan tidak ada dampak jika tidak berpartisipasi. Anggota forum tidak mendapat pemasukan karena tidak ada anggaran yang dialokasikan pemerintah Kota Cimahi. Saat ini telah terdapat pembagian klaster untuk mengefektifkan kegiatan penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir, sehingga meminimalisir duplikasi upaya. Sedangkan pihak masyarakat merasa bahwa tidak ada spesialisasi secara khusus bagi masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan koordinasi sebagai upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi.

Kesepakatan dan Komitmen dalam Proses Koordinasi Pemerintahan

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 menunjuk BPBD sebagai koordinator kegiatan penanggulangan bencana, termasuk bencana banjir di Kota Cimahi. Meskipun kerangka peraturan secara umum sudah baik, namun sayangnya dalam implementasinya terdapat kendala terutama karena pergantian kepemimpinan. Para pemimpin baru dinilai kurang berpengalaman dalam manajemen bencana karena biasanya tidak memiliki *background* terkait penanggulangan bencana sebelumnya, sehingga ini bisa dikatakan sebagai tantangan bagi pihak BPBD Kota Cimahi, namun sejauh berjalannya tugas, tidak ada kendala yang dirasakan terkait *gap* antara kebutuhan lapangan dengan regulasi yang ada. Dalam menjalankan tugasnya, BPBD Kota Cimahi bepegang pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Bencana memberikan wewenang kepada BPBD untuk menjadi koordinator dalam upaya penanggulangan bencana, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Cimahi.

Pihak Bappelitbangda, DPKP, DPRD, dan Masyarakat dalam menjalankan fungsinya terkait penanggulangan bencana alam khususnya banjir tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Cimahi dan keempat pihak tersebut tidak merasa adanya kendala dengan regulasi yang ada, hanya saja masyarakat cenderung tidak mengetahui peranannya secara pasti dalam upaya penanggulangan bencana banjir, terkhusus karena kurang dilibatkannya dalam acara koordinasi.

DPKP Kota Cimahi dalam menanggapi regulasi yang ada menjelaskan bahwa terkadang tidak sesuai antara regulasi yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan, misalnya berdasarkan peraturan dan kesepakatan bahwasanya penanganan banjir itu

diklasifikasikan kewenangannya pada tingkat pusat dan provinsi, namun secara empiris di lapangan apabila terjadi bencana banjir walaupun itu terjadi di daerah jalan yang memiliki pemerintah provinsi namun tetap tidak dilakukan penanggulangan dan membebarkannya kepada pihak kota, dalam hal ini DPKP.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Cimahi pada Pasal 54 Sub Bab Kerja Sama dimana dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah, dengan Instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya kerja sama belum dilakukan dengan pihak swasta dan partisipasi masyarakat juga masih kurang dilibatkan.

Sedangkan pihak Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Cimahi dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki dua payung hukum, yaitu Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Cimahi dan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 220/Kep. 1881-BPBD/2022 Tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Cimahi yang didalamnya berisikan ketentuan akan anggota forum yang terdiri dari 49 lembaga hingga ditetapkannya panitia pengurus forum. Masyarakat sendiri tidak mengetahui adanya regulasi atau kesepakatan bersama yang didalamnya mengikutsertakan pihak masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi, namun sebenarnya peranan masyarakat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Cimahi.

Penetapan Kesepakatan dalam Proses Koordinasi Pemerintahan

Pihak BPBD Kota Cimahi sebagai koordinator pada kegiatan koordinasi pemerintahan tidak merasa ada hal yang perlu disepakati secara bersama terkait upaya penanggulangan bencana banjir karena regulasi yang ada saat ini sudah cukup mumpuni. Sedangkan pihak DPRD Kota Cimahi selaku legislatif juga menyatakan bahwa tidak ada regulasi atau kesepakatan yang sedang dirumuskan saat ini terkait upaya penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir juga mengingat umur dari peraturan yang ada belum sampai 10 tahun sehingga belum perlu dilakukan pembaharuan. Bappelitbangda Kota Cimahi juga menyatakan hal yang sama bahwa regulasi yang ada saat ini sudah sangat cukup untuk menjadi payung hukum dalam menjalankan program penanggulangan bencana banjir, namun pihak DPKP merasakan bahwa harus ada pengajuan pembaharuan regulasi atau kesepakatan yang baru dan ini harus diajukan oleh BPBD selaku pihak koordinatornya. Sedangkan Pihak DPKP Kota Cimahi sudah pernah menjalin kesepakatan bersama dengan pihak Kota Bandung dalam program pembangunan kolam retensi di Pasir Kaliki Kota Cimahi.



Sumber: Portal Bandung, 2022

Gambar 1. 5 Kerja Sama Pemkot Bandung dan Pemkot Cimahi dalam Membangun Kolan Retensi

Gambar di atas adalah dokumentasi dari hasil kerja sama pihak Pemkot Bandung dengan Pemkot Cimahi dalam upaya penanggulangan bencana banjir melalui pembangunan kolam retensi seluas 7.000 meter persegi di atas lahan seluas 10.000 meter persegi. Kolam retensi ini diharapkan dapat mengurangi banjir yang ada di Cimahi dan Bandung khususnya daerah perbatasan wilayah Cimahi, Cibeer, dan Cilember. Berkat dari kerja sama ini, kolam retensi dapat mengurangi air gernangan setidaknya 28.000 meter kubik¹. Kolam retensi ini belum secara permanen selesai karena akan dibangun Kembali oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) pada tahun 2025 mendatang dan pihak Kota Cimahi telah mengajukan anggaran sebesar Rp8 Miliar untuk pembangunan ini. Rencana pembangunan kolam retensi oleh BBWS ini seharusnya sudah selesai pada tahun 2023, namun rencana pembangunan terjadi *delay* dan akan dibangun pada tahun 2025 mendatang. Pihak DPKP Kota Cimahi merasa bahwa harus ada pembaruan pada regulasi yang ada dalam upaya penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir.

Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kota Cimahi menyatakan bahwa pihaknya tidak secara langsung berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan hingga saat ini FPRB juga tidak pernah secara langsung mengambil keputusan untuk kepentingan publik atau anggota koordinasi karena pada dasarnya forum ini berfungsi untuk memastikan kelembagaan penanggulangan bencana dapat bersinergi dengan baik. Namun hingga saat ini proses kegiatan forum sudah sesuai dengan payung hukum yang ada walaupun terdapat beberapa hal yang secara regulasi tertulis namun secara empiris tidak terealisasi.

Pihak masyarakat juga merasa bahwa kegiatan penetapan kesepakatan ini perlu untuk dilakukan mengingat bencana banjir merupakan hal yang kerap terjadi namun tidak kunjung terselesaikan, Epon Kurniawati dan Titin Kusmiatin selaku warga yang terkena dampak bencana banjir di kecamatan citeureup menyatakan bahwa mereka belum pernah mengikuti acara koordinasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta.

pihak BPBD Kota Cimahi belum menyampaikan hal yang menjadi urgensi dalam upaya penanggulangan bencana banjir kepada para anggota koordinasi dalam hal ini DPRD, Bappelitbangda, DPKP Kota Cimahi, dan Masyarakat terkait tindakan yang harus dilakukan terkait upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi dalam bentuk penetapan kesepakatan, namun DPKP sendiri telah melakukan suatu kesepakatan bersama dengan pihak Kota Bandung sebagai hasil dari koordinasi yang terjadi di TKPSDA pada tahun 2021 dengan hasil dibuatkannya kolam retensi oleh pihak Pemerintah Kota Bandung di atas tanah milik Pemerintah Kota Cimahi

Insentif dalam Proses Koordinasi Pemerintahan

Insentif dan Sanksi yang diberlakukan pada internal BPBD Kota Cimahi tidak kepada para ASN di dalamnya, melainkan diterapkan kepada para relawannya yang merupakan Tenaga Harian Lepas (THL). Terdapat 'uang lelah' yang diberikan kepada para anggota relawannya yang melakukan pekerjaan karena pada dasarnya para relawan itu tidak bekerja setiap saat, lalu sistem sanksi juga diberlakukan kepada para relawannya dalam bentuk skors selama satu bulan apabila terbukti melakukan kesalahan. Kesalahan yang kerap dilakukan adalah emosi yang tidak terkontrol di lapangan karena terlalu terbawa suasana. Sedangkan untuk penghargaan, pihak BPBD belum pernah mendapatkannya mengingat tidak ada pemeringkatan oleh BNPB terkait BPBD terbaik di Indonesia.

Sistem insentif dan sanksi juga tidak diberlakukan di Bappelitbangda Kota Cimahi, DPKP Kota Cimahi, DPRD Kota Cimahi, hingga masyarakat di Kota Cimahi yang turut serta dalam upaya penanggulangan bencana banjir karena memang tidak ada nomenklatur yang

¹ Yan, "Kolaborasi Pemkot Bandung dan Cimahi Sukses Hadirkan Kolam Retensi", (<https://www.bandung.go.id/news/read/6122/kolaborasi-pemkot-bandung-dan-cimahi-sukses-hadirkan-kolam-retensi>), Diakses pada 13 April 2024.

membahas mengenai sanksi dan insentif ini. Hingga pada acara koordinasi pemerintahan yang mengikutsertakan beberapa pihak di atas juga tidak menerapkan sistem insentif dan sanksi, namun untuk OPD dan DPRD di atas memiliki Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diberikan, sanksi juga tidak diberlakukan selama memiliki reasoning yang kuat terkait tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.

Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kota Cimahi tidak menerapkan sistem insentif dan sanksi bagi para anggota pengurusnya dan juga bagi lembaga yang ada di dalam forum tersebut. Pada dasarnya anggota forum tersebut berupa sukarelawan, sehingga pengurus forum yang berfungsi dan melakukan koordinasi terkait upaya penanggulangan bencana banjir tidak mendapatkan upah atau pendapatan dari pihak manapun mulai dari pertama berdirinya forum hingga saat ini kurang lebih lima tahun. Maka dari itu saat ini pihak pengurus forum sedang mengusahakan agar setidaknya pengurus forum bisa mendapatkan insentif. Sedangkan pihak masyarakat merasa bahwa insentif dan sanksi tidak perlu untuk diberlakukan mengingat Waktu itu pernah ada program padat karya dan bagi masyarakat yang membantu akan diberi uang jadi lingkungan benar-benar bersih, namun saat program itu selesai program bersih- bersihnya tidak dilakukan lagi. Programnya bagus, bersih bersih jalan dan gang sehingga orang yang tidak bekerja jadi ada penghasilan, tapi ya kalau ada uangnya bergerak, kalau tdiak gamau bergerak.

Feedback dalam Proses Koordinasi Pemerintahan

Terkait feedback, pihak BPBD Kota Cimahi pernah melakukan survey melalui google form yang disebarakan kepada masyarakat melalui Instagram story yang dilakukan oleh forum PRB pada masa Covid-19 atau tahun 2020. Rata-rata masukan adalah terkait upaya peningkatan kualitas pelayanan. Umpan balik datang dari pihak masyarakat dan OPD lainnya di Kota Cimahi seperti DPKP dan Forum PRB. Sedangkan umpan balik yang disampaikan oleh pihak Bappelitbangda kerap disampaikan kepada pihak DPKP Kota Cimahi karena memang kedua badan tersebut yang melakukan komunikasi secara intens dibandingkan badan lainnya dalam upaya penanggulangan bencana banjir.

Sebagai salah satu badan yang secara langsung turun ke lapangan dalam upaya penanggulangan bencana banjir, DPKP Kota Cimahi kerap mendapatkan umpan balik baik dari masyarakat maupun dari OPD lainnya. Banyak masukan dari masyarakat dan OPD lain, namun ada salah satu hal yang menjadi salah paham, misalnya ada tanggul sungai yang roboh, di satu sisi ternyata rumah yang rusak itu dibangun di atas tanggul, banyak masyarakat yang membuat pondasi di atas tanggul, sedangkan apabila ditindak lanjuti maka rumah bisa hancur. Untuk masalah tersebut DPKP memberikan saran berupa diperbaikinya rumah namun rumah tersebut harus dimundurkan sekitar 3 meter. Jadi untuk *feedbacknya* banyak dari masyarakat yang merasa bahwa kinerja DPKP kurang baik seperti tidak ada tindak lanjut setelah adanya survey, padahal memang tidak ada jalan keluarnya selain masyarakatnya mengalah untuk memundurkan lahan bangunannya. Di samping itu, Umpan balik juga kerap DPKP sampaikan kepada OPD lain dan masyarakat terkait upaya penanggulangan banjir, salah satunya adalah melalui group TKPSDA untuk berkoordinasi dengan pihak eksternal Kota Cimahi dan melalui group kecebong dan kamalir.

Sedangkan pihak DPRD Kota Cimahi menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak pernah mendapatkan umpan balik terkait kegiatan koordinasi pemerintahan dalam upaya penanggulangan bencana banjir, justru pihak DPRD yang kerap memberikan umpan balik pada acara rapat koordinasi yang dilakukan selama tiga bulan sekali dan pihak DPRD juga melakukan sidak kepada pihak lain baik itu eksekutif maupun pihak swasta apabila terdapat kekeliruan ada permasalahan dalam proses penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi.

Feedback dari pihak Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Cimahi disampaikan kepada pihak masyarakat, pemerintah, maupun swasta. Secara garis besar

umpan balik dari pihak forum PRB adalah terkait masyarakat yang harus lebih sadar akan bencana hingga memiliki kemampuan dalam melakukan evakuasi mandiri, sedangkan kepada pihak pemerintah forum mengharapkan ada dukungan yang lebih banyak karena secara regulasi yang ada sudah dirasa cukup, hanya saja untuk anggaran tidak ada. Pihak masyarakat pernah memberikan umpan balik kepada pihak pemerintah, dalam hal ini DPKP Kota Cimahi terkait bencana banjir yang kerap terjadi di daerahnya, namun dari pihak pemerintah hingga saat ini belum merealisasikan feedback yang telah disampaikan.

KESIMPULAN

Upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Cimahi dari segi komunikasi bisa dikatakan kurang maksimal, contohnya terdapat permasalahan seperti lambatnya proses komunikasi, miskomunikasi mengenai kewenangan, birokrasi yang rumit, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses koordinasi. Peran masyarakat dalam proses koordinasi masih kurang dan bahkan pihak swasta tidak dilibatkan. Dari segi kesadaran akan pentingnya koordinasi, semua anggota sepakat akan pentingnya koordinasi. Namun masih terdapat permasalahan seperti rumitnya pembagian wewenang dan kewajiban antar OPD. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan kesadaran akan koordinasi dan komunikasi yang lebih intens, baik secara formal maupun informal sehingga dapat membantu meningkatkan kegiatan penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi.

Indikator kompetensi partisipan dalam kegiatan koordinasi pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi bisa dikatakan baik karena adanya keselarasan baik dari segi latar belakang pendidikan hingga minat yang sama dengan bidang penanggulangan bencana banjir. Jumlah sumber daya manusia di masing-masing badan koordinasi pemerintah dinilai sudah cukup, kecuali DPKP yang merasa jumlah tim lapangan tidak mencukupi untuk mengentas semua permasalahan bencana banjir di Kota Cimahi. Penanganan bencana banjir di Kota Cimahi mendapat kritik dari masing-masing pihak anggota koordinasi karena adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dan kenyataan, namun sayangnya hampir semua pihak anggota koordinasi merasa tidak memerlukan regulasi atau kesepakatan baru terkait upaya penanggulangan bencana banjir, hanya pihak DPKP saja yang merasa perlu hadirnya regulasi baru. Pihak DPRD Kota Cimahi juga tidak memandang permasalahan banjir ini menjadi prioritas utama di Kota Cimahi karena merasa bahwa regulasinya belum bersifat usang, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya rencana perumusan kebijakan yang baru karena regulasi yang ada belum berumur sepuluh tahun.

Masyarakat merasa masih belum jelas perannya dalam penanggulangan bencana banjir ditambah sektor swasta yang kurang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana banjir, meskipun peran mereka disebutkan dalam peraturan daerah. Koordinasi pemerintah Kota Cimahi tidak menerapkan insentif dan sanksi bagi seluruh anggota karena tidak adanya nomenklatur mengenai hal-hal tersebut, dan masyarakat menilai hal tersebut bukanlah hal yang mendesak. Terkait *feedback*, sebagian besar umpan balik hanya berjalan antara dua OPD saja sehingga mengakibatkan koordinasi menjadi tidak efisien. DPKP menghadapi tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia. Maka dari itu, koordinasi pemerintahan dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi belum berjalan secara maksimal, mengingat tidak adanya rapat koordinasi yang dilangsungkan dengan mengundang keseluruhan *stakeholder* secara bersama sehingga kewenangan dari setiap badan atau lembaga cenderung tumpang tindih atau bahkan tidak menyentuh kepada konsep penanggulangan bencana banjir, sementara itu masukan dari pihak BPBD belum maksimal tersampaikan kepada pihak eksternal badan, permasalahan lainnya adalah birokrasi yang rumit sehingga mengakibatkan sulitnya penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi terealisasikan secara maksimal.

REFERENSI

- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=fV0XEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=apa+itu+good+governance&ots=jO7wGFAh7F&sig=rjhab_yNTrmnGTjszwbuTYuUeJ8&redir_esc=y#v=onepage&q=apa+itu+good+governance&f=false
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar. Makasar. http://eprints.unm.ac.id/20838/1/buku_Sapto_METODOLOGI.pdf.
- Mulyawan, D. R. (2015). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Sumedang: UNPAD Press.
- Ndraha, T. (2011). *Ilmu Pemerintahan Baru* (1st ed.). Rineka Cipta. Jakarta
- Ndraha, T. (2015). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta. Jakarta
- Soekanto, S. (2018). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung
- Aulia. (2016). *Mitigasi Bencana Banjir : Pengertian, Jenis dan Upaya Penanggulangannya*. Ilmugeografi.Com. <https://ilmugeografi.com/bencana-alam/mitigasi-bencana-banjir>
- Bencana, B. N. P. (n.d.). *Definisi Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://www.bnpb.go.id/definisi-bencana>
- Bogor, B. K. (2022). *Dampak Bencana Alam, Negatif maupun Positif*. BPBD Kabupaten Bogor.
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwjwzfmX1s_AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fbpbdbogorkab.go.id%2Fdampak-bencana-alam-negatif-maupun-positif%2F&psig=AOvVaw2OV8bpbg9IbL4YwfA9RCc&ust=16872
- Dqlab. (2021). *Kenali 4 Perbedaan Data Sekunder dan Data Primer Saat Melakukan Penelitian*. Dqlab.Id. <https://dqlab.id/kenali-4-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer-saat-melakukan-penelitian>
- Hutan, L. (2022). *Mitigasi Bencana: Pengertian, Jenis, dan Penjelasan*. Lindungihutan.Com. <https://lindungihutan.com/blog/penjelasan-lengkap-mitigasi-bencana/>
- Perkim.id. (2020). *Profil PKP Kota Cimahi*. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-cimahi/>
- Publik.id, P. (2020). *Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan, Tugas, Fungsi Hingga Jenisnya*. Pelayananpublik.Id. <https://pelayananpublik.id/2020/06/15/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan-tugas-fungsi-hingga-jenisnya/>
- Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya. (2023). *Mengenal Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. <https://pmb.itats.ac.id/mengenal-perbedaan-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/>
- Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>
- Fai. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Adalah*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-adalah/>
- Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya. (2023). *Mengenal Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. <https://pmb.itats.ac.id/mengenal-perbedaan-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/>
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. p-ISSN 2549-7332 %7C e-ISSN 2614-1167%0D

- Ramdhany, I., & Djumiarti, T. (2016). Faktor-Faktor dalam Koordinasi Lintas Sektoral Pengelolaan Drainase di Kota Semarang. *Fisip Undip*, 1–16.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Deepublish.
- Triyananda, D. (2019). *Pembuatan Smart Map 3D Potensi Banjir Dan Genangan Di*. 1049–1054. <https://doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.995>